

ABSTRAK

Ria Irawati, S301502005, *Informed Consent* Sebagai Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Transaksi Terapeutik Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Dokter dan Pasien. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis *Informed Consent* sebagai pemenuhan hak dan kewajiban dalam transaksi terapeutik di bidang pelayanan medis. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-2 yaitu Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional. Bentuk penelitiannya adalah evaluatif. Jenis data sekunder, dan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) *informed consent* dalam pelayanan kesehatan adalah melindungi dan meningkatkan otonomi pasien, melindungi pasien dan mencegah tindakan manipulatif dan pemaksaan, meningkatkan sikap mawas diri dari tim medis. Perlindungan hak pasien yaitu melindungi dan meningkatkan otonomi individu, yaitu dalam hubungan baik antara dokter dan pasien akan mencegah terjadinya ketidaktahuan yang justru menghambat otonomi pasien dan/atau keluarganya untuk memutuskan, ketidaktahuan mana dapat berasal dari kekurangan informasi atau kekurangpahaman tentang informasi tersebut. (2) *Informed consent* harus muncul dari keputusan bebas (*voluntarium*) orang yang kompeten dan sesuai dengan pemahaman pasien dan petugas medis. Unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan *informed consent* mencakup unsur kompetensi yaitu mengacu ke suatu prekondisi untuk bertindak secara sukarela karena sudah memahami pentingnya informasi. Rekomendasi yang disampaikan adalah (1) Apabila terjadi penolakan pasien/keluarga untuk memberikan persetujuan maka tenaga medis harus bersikap rasional sebagai medikus sekaligus etikus moralis dengan mempertimbangkan kondisi pasien khususnya tindakan medis yang dikategorikan sebagai *extraordinary means*. (2) Tenaga medis perlu memperhatikan pelaksanaan *informed consent* dan *the profesional practice standart* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena setiap kelalaian atau kesalahan tindakan medis akan membawa konsekuensi yuridis.

Kata Kunci : Informed Consent; Transaksi Terapeutik; Pelayanan Medis.

ABSTRACT

Ria Irawati, S301502005, of Informed Consent as Fulfillment of Rights and Obligations in Therapeutic Transactions of Protection the Law is the Doctor and Patient . Thesis : Postgraduated Program Universitas Sebelas Maret of Surakarta

This article aims to analyze the urgency of informed consent as fulfillment of rights and obligations in therapeutic transactions in the field of medical services. The type of research in this writing is doctrinal, based on the second concept of law, namely Law is positive norms in the national legislation system. The form of this research is evaluative. Types of secondary data, and data sources include primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the research and discussion related to the problems studied, it can be summarized as follows : (1) The of informed consent in health services is to protect and increase patient autonomy, protect patients and prevent manipulative and coercive actions, improve the attitude of self-awareness of the medical team. Protection of patient rights, namely protecting and increasing individual autonomy, that is, in good relations between doctors and patients will prevent the occurrence of ignorance which actually inhibits the autonomy of patients and / or their families to decide, which ignorance can come from lack of information or lack of understanding of the information. (2) Informed consent must arise from the free decision (voluntary) of people who are competent and in accordance with the understanding of patients and medical staff. The elements that must exist in the implementation of informed consent include the element of competence which refers to a precondition to act voluntarily because it already understands the importance of information. The recommendations conveyed are (1) If there is a refusal of the patient / family to give consent, the medical staff must be rational as a medic and moralist ethic by considering the patient's condition, especially medical actions categorized as extraordinary means. (2) Medical personnel need to pay attention to the implementation of informed consent and standard professional practice in accordance with applicable regulations, because any negligence or error in medical action will have juridical consequences.

Keywords : Informed Consent; Therapeutic Transactions; Medical Services.